

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adioetomo, S. M., Mont, D., & Irwanto, I. (2014). *Persons with Disabilities in Indonesia: Empirical Facts and Implications for Social Protection Policies*. Jakarta Pusat: TNP2K.
- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, C. S. (2006). *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20, cetakan ke-2*. Bandung, Penerbit Alumni.
- Goesniadhie, K. (2006). *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan: lex specialis suatu masalah*. Surabaya: JP Books.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. Mertokusumo, Sudikno.
- Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Jajarta, Pustaka pelajar.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Soekanto, D. P. B. S. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2015. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet 31*. Jakarta: PT. Intermedia.
- Tutik, D. T. T., & SH, M. (2015). *Hukum perdata dalam sistem hukum nasional*. Kencana.

## B. Jurnal

- Anggriawan, T. P. (2021). Hukum Pengangkatan anak melalui akta pengakuan pengangkatan anak yang dibuat oleh notaris. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, vol 3 no 1, 1-14. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.272>
- De Sabbata, K. (2020). Dementia, treatment decisions, and the UN convention on the rights of persons with disabilities. A new framework for old problems. *Frontiers in Psychiatry*, vol 11, 571722. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2020.571722>
- Panglipurjati, P. (2021). Sebuah Telaah atas Regulasi dan Penetapan Pengampuan bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia dalam Paradigma Supported Decision Making. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, vol 6 no 02, 79-109. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v6i02.2586>
- Rusydi, R., Bagus, S. S., Sholihan, S., Sudin, A., & Qulub, A. (2024). Analisis Hukum Terhadap Pengampuan Atas Penyandang Disabilitas Mental (Studi Penetapan Pengadilan No. 2238/Pdt.P/2021/PN.Sby). *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, vol 16 no 01, 40-65.
- Sanusi, I., Rato, D., & Susanti, D. O. (2023). Kedudukan Hukum Ahli Waris Penyandang Cacat Mental Dalam Memperoleh Hak Warisnya (Harta Waris). *MIMBAR YUSTITIA: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, vol 7 no 1, 105-118.

Sharfina, V. H., & Sukananda, S. (2019). Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang Yang Berada Dalam Pengampuan (Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/PDT. P/2015/PA. BTL). *Justitia Jurnal Hukum*, vol. 3 no 2  
<https://doi.org/10.30651/justitia.v3i2.3650>

Sodiqin, A. (2021). Ambiguitas perlindungan hukum penyandang disabilitas dalam perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol 18 no 1, 31.

Szmukler, G. (2019). “Capacity”, “best interests”, “will and preferences” and the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. *World Psychiatry*, vol 18 no 1, 34-41.  
<https://doi.org/10.1002/wps.20584>

Umami, A., & Silvia, E. (2020). Perlindungan Hukuman Bagi Ahli Waris Penderita Down Syndrome Dalam Burgelijk Wetboek (BW). *Jurnal Al Himayah*, vol 4 no 1, 175-184.

Widinarsih, D. (2019). Penyandang disabilitas di indonesia: perkembangan istilah dan definisi. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, vol 20 no 2, 127-142.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang

perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan CRPD; Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251.

Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas.

#### D. Internet

Fadhilah Nuraini Rustam, Syarat dan Prosedur Permohonan Seseorang di Bawah Pengampuan, [https://dntlawyers.com/syarat-dan-prosedur-permohonan-seseorang-di -bawah-pengampuan/](https://dntlawyers.com/syarat-dan-prosedur-permohonan-seseorang-di-bawah-pengampuan/). Diakses pada 3 Maret 2024.

Rima Paramita Sita, “Analisis Yuridis Pemeriksaan Calon Terampu Sebelum Adanya Penetapan Pengampuan Oleh Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2221K/Pdt/2010)”.

<https://media.neliti.com/media/publications/14162-ID-analisis-yuridis-pemeriksaan-calon-terampu-sebelum-adanya-penetapan-pengampuan-o.pdf>. Diakses pada 3 Maret 2024.